



PERANAN HUKUM NEGARA DALAM MENJAGA KEADILAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

Aliza Qory Imeltha

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Korespondensi penulis : alizaqory13@gmail.com

***Abstract** State law plays a vital role in maintaining justice and order in society. This article discusses the function of state law in protecting citizens' rights, regulating community behavior, and upholding justice. This study uses a qualitative descriptive method by reviewing relevant literature and analyzing laws and regulations in force in Indonesia. The results of the study indicate that state law plays an important role in creating a just and orderly social order, as well as in maintaining national stability.*

Keywords: State law, justice, public order, laws and regulations, national stability.

Abstrak Hukum negara memainkan peranan vital dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Artikel ini membahas fungsi hukum negara dalam melindungi hak-hak warga negara, mengatur perilaku masyarakat, dan menegakkan keadilan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengkaji literatur yang relevan dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum negara berperan penting dalam menciptakan tatanan sosial yang adil dan tertib, serta dalam menjaga stabilitas nasional.

Kata Kunci : Hukum negara, keadilan, ketertiban masyarakat, peraturan perundang-undangan, stabilitas nasional.

Pendahuluan

Hukum negara merupakan pondasi yang tak tergantikan dalam sebuah masyarakat. Sebagai seperangkat aturan yang dibuat oleh pemerintah, hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kehidupan Masyarakat (Putri, P. A. A. A. 2022). Terlepas dari sistem politik yang dianut suatu negara, peran utama hukum negara adalah untuk memastikan keadilan dan ketertiban. Keadilan menjadi tujuan utama dari penerapan hukum karena adanya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat yang memerlukan perlakuan yang adil untuk setiap individu. Tanpa hukum yang mengatur, masyarakat akan cenderung menjadi kacau dan tidak teratur. Oleh karena itu, hukum negara hadir untuk menciptakan kerangka yang teratur dan menjamin bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap keadilan. Selain memastikan keadilan, hukum negara juga bertujuan untuk melindungi hak-hak individu. Hak-hak ini meliputi hak asasi manusia yang merupakan hak yang melekat pada setiap individu sebagai manusia. Hak-hak ini meliputi hak atas kehidupan, kebebasan, dan

kebahagiaan, serta hak untuk diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum. Perlindungan terhadap hak-hak individu ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang memiliki otoritas, seperti pemerintah atau kelompok yang berkuasa (See, B. R. 2020). Dengan adanya hukum yang melindungi hak-hak individu, setiap orang memiliki jaminan bahwa kebebasan dan martabatnya akan dihormati dan dilindungi oleh negara.

Di dalam negara demokrasi seperti Indonesia, hukum negara memiliki peran tambahan dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara serta mengontrol kekuasaan pemerintah. Prinsip demokrasi menekankan pentingnya partisipasi aktif dari rakyat dalam pembentukan dan penerapan hukum. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya menjadi alat untuk menjaga ketertiban, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan rakyat. Dengan kata lain, hukum negara menjadi penjaga bagi prinsip-prinsip demokrasi yang mendasari sistem politik suatu negara. Tantangan yang sering muncul adalah dalam implementasi hukum itu sendiri. Meskipun aturan telah ditetapkan, penegakan hukum seringkali mengalami hambatan karena berbagai faktor, termasuk korupsi, kekurangan sumber daya, dan intervensi politik (Purba, R. E., Maharani, D., BMY, M. A. A., & Al Zahra, R. Z. 2024). Tanpa penegakan hukum yang efektif, aturan tersebut hanya akan menjadi teori belaka dan keadilan tidak akan pernah terwujud. Penting bagi suatu negara untuk memiliki sistem peradilan yang independen dan efisien yang dapat menjamin penegakan hukum yang adil dan setara bagi semua warga negara.

Dinamika dalam masyarakat yang terus berkembang juga menuntut adaptasi dalam sistem hukum. Perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi sering kali memunculkan tantangan baru yang tidak diantisipasi dalam hukum yang ada. Fleksibilitas dalam pembentukan dan interpretasi hukum menjadi kunci untuk menjaga relevansi dan efektivitasnya dalam mengatur kehidupan masyarakat yang selalu berubah. Hukum negara memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kehidupan Masyarakat (Ansari, T. S. 2018). Selain memastikan keadilan dan ketertiban, hukum juga bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sebuah negara. Namun, untuk

mencapai tujuan tersebut, diperlukan penegakan hukum yang efektif serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat. Hanya dengan demikian, hukum negara dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan teratur bagi semua warga negara.

Tinjauan Pustaka

Pengembangan teori-teori hukum dari para ahli seperti Hans Kelsen dan John Austin telah memberikan landasan yang kuat bagi pemahaman tentang sistem hukum modern. Hans Kelsen, dalam karyanya yang terkenal, "Teori Murni tentang Hukum," menyatakan bahwa hukum harus dipahami sebagai seperangkat norma yang diatur hierarkis, di mana hukum yang lebih tinggi mengontrol hukum yang lebih rendah. Pendekatan ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami struktur hukum secara hierarkis dan memberikan dasar bagi pembentukan sistem hukum yang terorganisir (Najicha, F. U. 2022). Di sisi lain, John Austin menekankan pentingnya kekuasaan dalam menetapkan hukum. Menurut Austin, hukum adalah perintah yang diberikan oleh penguasa kepada rakyatnya, yang didasarkan pada ancaman sanksi. Dalam konteks ini, peran hukum dalam masyarakat menjadi subjek kajian yang menarik bagi para sosiolog. Max Weber, seorang sosiolog terkemuka, menyoroti konsep dominasi hukum dalam masyarakat modern. Menurut Weber, hukum adalah alat yang digunakan oleh penguasa untuk mempertahankan otoritas mereka, dan dalam masyarakat modern, dominasi hukum menjadi semakin kompleks dengan adanya birokrasi dan rasionalisasi. Di sisi lain, Emile Durkheim, seorang sosiolog fungsionalis, menekankan pentingnya hukum sebagai faktor pengikat sosial. Baginya, hukum memainkan peran krusial dalam memelihara solidaritas sosial dan memastikan stabilitas dalam masyarakat.

Selain pandangan teoritis dari para ahli tersebut, undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan di Indonesia juga memainkan peran penting dalam penelitian ini. Undang-undang dasar merupakan fondasi bagi sistem hukum sebuah negara dan menetapkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur struktur pemerintahan dan hak asasi manusia. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan bagi pembentukan hukum negara dan menentukan prinsip-prinsip demokrasi serta kedaulatan rakyat (Markus, A., Nayoan, H., & Sampe, S. 2018). Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah juga

memainkan peran penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari ekonomi, sosial, hingga lingkungan hidup. Melalui literatur yang relevan dengan topik ini, kita dapat memahami bahwa hukum bukanlah entitas yang terpisah dari masyarakat, tetapi merupakan produk dari dinamika sosial, politik, dan budaya. Teori-teori hukum yang dikembangkan oleh para ahli seperti Kelsen, Austin, Weber, dan Durkheim memberikan wawasan mendalam tentang sifat dan peran hukum dalam masyarakat. Di samping itu, pemahaman terhadap undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan gambaran tentang bagaimana sistem hukum negara ini diatur dan mengatur kehidupan masyarakatnya. Dengan demikian, penelitian tentang peran hukum dalam masyarakat memerlukan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan perspektif dari berbagai bidang pengetahuan, termasuk hukum, sosiologi, dan politik.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengusung pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi kepustakaan sebagai metode utama. Fokusnya terletak pada eksplorasi dan analisis berbagai dokumen, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan literatur akademik yang mengupas tentang hukum negara serta perannya dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan ruang yang luas untuk pemahaman mendalam tentang subjek yang kompleks seperti hukum (Arif, M. 2021). Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan analisis mendalam terhadap berbagai sumber untuk memahami secara komprehensif tentang hukum negara dan implikasinya dalam masyarakat. Studi ini mempergunakan metode deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis berbagai aspek hukum negara yang relevan. Pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti untuk menjelaskan fenomena hukum yang ada, termasuk perkembangannya dari waktu ke waktu dan dampaknya terhadap masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terinci tentang bagaimana hukum negara beroperasi dalam konteks sosial yang beragam.

Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui analisis teliti terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan hukum negara. Hal ini mencakup undang-undang yang berlaku, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, serta literatur akademik yang relevan.

Pendekatan analisis dokumen memberikan keleluasaan untuk mengeksplorasi beragam perspektif dan pendekatan terhadap hukum negara, mulai dari aspek historis, filosofis, hingga kontemporer (Cortright, C. E., McCann, W., Willits, D., Hemmens, C., & Stohr, M. K. 2020). Pemilihan metode studi kepustakaan sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini memiliki keuntungan tersendiri. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk mengakses berbagai sumber informasi yang sudah ada tanpa harus melakukan pengumpulan data primer yang memakan waktu dan biaya. Dengan demikian, penelitian ini dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang hukum negara dan fungsinya dalam masyarakat.

Melalui pendekatan deskriptif kualitatif dan studi kepustakaan, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang hukum negara dan perannya dalam Masyarakat (Zulkifli, Z. 2024). Analisis yang mendalam terhadap berbagai dokumen hukum diharapkan dapat mengungkap beragam aspek hukum yang relevan dan implikasinya dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman dan pengembangan hukum negara yang lebih efektif dan berkeadilan.

Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hak-Hak Warga Negara

Hukum negara memegang peranan krusial dalam melindungi hak-hak warga negaranya. Melalui konstitusi dan serangkaian undang-undang, negara bertanggung jawab atas jaminan hak-hak dasar yang meliputi kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, dan hak untuk hidup sejahtera. Sebagai contoh, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, Pasal 28A hingga Pasal 28J secara rinci mengatur mengenai hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara (Istiqomah, A. N., Uzhma, Y. A., & Fadilah, S. 2024). Pentingnya peran hukum negara dalam melindungi hak-hak warga negara terlihat jelas dalam pemastian kebebasan berpendapat. Hak ini merupakan salah satu fondasi demokrasi yang kuat, di mana setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya tanpa takut akan penindasan atau pembatasan dari pihak pemerintah atau entitas lainnya. Hukum negara, melalui konstitusi dan undang-undang yang ada, menjamin bahwa

kebebasan berpendapat tetap terjaga, sekaligus memberikan jaminan perlindungan bagi mereka yang menggunakan hak ini untuk menyuarakan pikiran dan pandangan mereka.

Selain kebebasan berpendapat, hukum negara juga memiliki peran penting dalam menjamin hak atas pendidikan bagi setiap warga negara. Pendidikan adalah hak dasar yang tidak bisa diabaikan karena merupakan pondasi bagi kemajuan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui keberadaan undang-undang yang mengatur sistem pendidikan, negara memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi. Hal ini tidak hanya mencakup hak untuk mendapatkan pendidikan formal, tetapi juga hak untuk mengembangkan potensi secara maksimal melalui berbagai bentuk pembelajaran. Hukum negara juga berperan dalam menjamin hak untuk hidup sejahtera bagi warga negaranya. Hak ini mencakup hak atas pekerjaan yang layak, hak untuk memiliki standar hidup yang mencukupi, serta hak untuk mendapatkan perlindungan sosial dari negara (Nugraha, S., Amalia, M., Handrianus, H., Alviani, F. M., Nuribadah, N., Mutolib, A., ... & Nurhidayati, N. 2023). Undang-undang ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, dan program-program kesejahteraan sosial adalah beberapa contoh dari mekanisme yang digunakan oleh negara untuk memastikan bahwa hak-hak ini terlindungi dan dipenuhi bagi seluruh warga negaranya.

Meskipun hukum negara memberikan kerangka kerja yang jelas untuk perlindungan hak-hak warga negara, implementasi dan penegakannya sering kali menghadapi tantangan. Terdapat kesenjangan antara hukum yang ada dan realitas di lapangan, di mana beberapa kelompok mungkin masih mengalami diskriminasi atau marginalisasi meskipun hak-hak mereka dilindungi secara hukum. Selain adanya undang-undang yang kuat, penting juga untuk memastikan adanya mekanisme yang efektif untuk mengawasi pelaksanaan hukum dan menjamin bahwa hak-hak warga negara benar-benar dihormati dan dilindungi secara menyeluruh (Aryani, K., Masturah, D., Dilaga, I. S., Ilmiyawan, K. R., & Siswajanthi, F. 2023). Dalam konteks globalisasi dan perubahan sosial yang terus-menerus, peran hukum negara dalam melindungi hak-hak warga negara menjadi semakin kompleks dan menuntut. Negara harus mampu mengikuti perkembangan zaman dan menyesuaikan undang-undang serta kebijakan publiknya agar tetap relevan dan efektif dalam melindungi hak-hak warga

negara. Selain itu, kerjasama antar-negara juga menjadi penting dalam mengatasi tantangan yang bersifat lintas batas dalam perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, hukum negara memainkan peranan utama dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, serta memastikan bahwa hak-hak warga negara terlindungi dan dihormati sepanjang waktu.

2. Pengaturan Perilaku Masyarakat

Hukum negara memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur perilaku masyarakat agar tercipta tatanan sosial yang tertib. Dalam konteks ini, peraturan lalu lintas, hukum pidana, dan peraturan mengenai lingkungan hidup menjadi contoh konkret bagaimana hukum mengatur perilaku individu maupun kelompok dalam masyarakat. Peraturan lalu lintas, misalnya, mengatur perilaku pengguna jalan agar berlangsung secara tertib dan aman, meliputi aturan seperti batas kecepatan, tanda-tanda lalu lintas, dan hak prioritas di jalan raya. Hukum pidana, di sisi lain, memberikan aturan yang harus dipatuhi oleh individu dalam masyarakat untuk mencegah dan menindak tindak kejahatan (Roy, M. T., Agung, A., Monica, T., Supenawati, E., Febrianty, Y., & Hosnah, A. U. 2024). Sementara itu, peraturan mengenai lingkungan hidup memberikan landasan hukum bagi perlindungan dan pelestarian lingkungan alam dari kerusakan dan pencemaran. Penegakan hukum yang konsisten dan adil menjadi hal yang sangat penting dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan-aturan tersebut. Tanpa penegakan yang efektif, aturan hukum menjadi sekadar tulisan tanpa makna nyata dalam kehidupan sehari-hari. Penegakan hukum yang konsisten memastikan bahwa pelanggaran aturan tidak dibiarkan begitu saja tanpa tindakan, sehingga masyarakat dapat merasa bahwa hukum itu adil dan berlaku untuk semua tanpa pandang bulu. Adanya mekanisme penegakan hukum yang adil juga penting untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan diskriminasi dalam proses penegakan hukum.

Dalam konteks peraturan lalu lintas, penegakan hukum yang konsisten dan adil berperan dalam menjaga keselamatan semua pengguna jalan. Dengan adanya penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas seperti melanggar lampu merah atau berkendara di atas batas kecepatan, masyarakat menjadi lebih disiplin dalam berlalu lintas, sehingga risiko kecelakaan dapat diminimalkan (Rahim, A., Safitri, N. U., Nurjanah, N.,

Anabah, S., & Nurhikmah, W. 2023). Penegakan hukum yang konsisten juga dapat memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas demi keamanan bersama. Penegakan hukum dalam konteks hukum pidana berperan dalam mencegah tindak kejahatan dan memberikan keadilan kepada korban. Dengan adanya penindakan terhadap pelaku kejahatan, masyarakat dapat merasa bahwa hukum benar-benar memberikan perlindungan terhadap mereka. Selain itu, penegakan hukum yang konsisten dapat menjadi dorongan bagi individu untuk tidak melakukan tindakan kriminal karena adanya konsekuensi yang jelas atas perbuatannya.

Dalam kasus peraturan mengenai lingkungan hidup, penegakan hukum yang konsisten dan adil dapat menjadi instrumen penting dalam memastikan perlindungan terhadap ekosistem dan sumber daya alam. Dengan mengambil tindakan terhadap perusahaan atau individu yang mencemari lingkungan, hukum memberikan sinyal bahwa kerusakan lingkungan tidak akan ditoleransi dan akan ada konsekuensi serius bagi pelakunya. Penegakan hukum yang konsisten juga dapat memicu perubahan perilaku menuju praktik yang lebih ramah lingkungan, karena individu atau perusahaan akan lebih berhati-hati dalam aktivitas mereka. Hukum negara memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur perilaku masyarakat untuk menciptakan tatanan sosial yang tertib. Peraturan lalu lintas, hukum pidana, dan peraturan mengenai lingkungan hidup merupakan contoh konkret bagaimana hukum mengatur perilaku individu maupun kelompok dalam masyarakat. Namun, penegakan hukum yang konsisten dan adil diperlukan agar aturan-aturan tersebut dapat dijalankan dengan baik dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara nyata.

3. Penegakan Keadilan

Sistem peradilan yang efektif adalah fondasi yang kuat dalam menjaga kedaulatan hukum sebuah negara. Lembaga-lembaga peradilan, seperti Mahkamah Agung dan pengadilan negeri, memegang peran krusial dalam menegakkan keadilan dan menyelesaikan sengketa hukum dengan adil bagi semua pihak yang terlibat. Pentingnya sistem peradilan yang efektif tidak hanya terletak pada penegakan hukum, tetapi juga dalam memastikan bahwa hak asasi setiap individu dihormati dan dilindungi. Transparansi dan ketidakberpihakan dalam proses hukum merupakan syarat utama yang harus dipenuhi untuk

memastikan terwujudnya keadilan yang sejati dalam masyarakat. Salah satu aspek utama dari sistem peradilan yang efektif adalah keberadaan lembaga-lembaga peradilan yang independen dan berwenang (Destiani, C., Lumba, A. F., Wenur, A. S., Halim, M. A., Effendi, M. E., & Dewi, R. A. R. M. 2023). Mahkamah Agung, sebagai lembaga tertinggi dalam sistem peradilan suatu negara, bertugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang telah ditetapkan. Keberadaan pengadilan negeri yang tersebar di berbagai wilayah juga merupakan hal yang sangat penting, karena hal ini memastikan bahwa akses terhadap peradilan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Keberadaan lembaga-lembaga peradilan saja tidak cukup untuk menjamin terwujudnya keadilan dalam masyarakat. Proses hukum yang transparan dan tidak memihak juga merupakan faktor yang sangat vital. Transparansi dalam proses hukum mengacu pada keterbukaan dan keterjangkauan informasi hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Ini termasuk memberikan akses yang adil terhadap informasi, dokumen, dan bukti yang berkaitan dengan kasus yang sedang diproses oleh pengadilan. Ketidakberpihakan dalam proses hukum juga merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan. Penegakan hukum yang tidak memihak memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan didasarkan pada bukti dan fakta yang ada, bukan atas dasar pertimbangan politik, sosial, atau ekonomi. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem peradilan, serta untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan di mata hukum.

Selain menjalankan fungsi penegakan hukum, sistem peradilan yang efektif juga bertanggung jawab dalam memastikan bahwa hak asasi manusia setiap individu dihormati dan dilindungi. Hal ini mencakup hak untuk diperlakukan secara adil di hadapan hukum, hak atas kebebasan berpendapat, hak untuk tidak disiksa atau dianiaya, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum tanpa diskriminasi apapun. Oleh karena itu, peran lembaga peradilan dalam menjaga hak asasi manusia menjadi sangat krusial dalam menjaga keadilan dan kebebasan dalam Masyarakat (Yumna, F. 2023). Sistem peradilan yang efektif merupakan pondasi yang kuat dalam menegakkan kedaulatan hukum dan keadilan

dalam masyarakat. Melalui lembaga-lembaga peradilan yang independen, proses hukum yang transparan dan tidak memihak, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, sebuah negara dapat memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap keadilan di mata hukum. Oleh karena itu, penting bagi setiap negara untuk terus memperbaiki dan menguatkan sistem peradilan mereka guna memastikan bahwa keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh semua pihak dalam masyarakat.

Kesimpulan

Hukum negara memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Dengan menegakkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, hukum negara memberikan kerangka kerja yang penting bagi pembentukan dan pemeliharaan struktur sosial yang stabil dan aman bagi semua warga negara. Salah satu aspek utama dari peran hukum negara adalah perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Ini mencakup hak-hak dasar seperti hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, dan hak atas properti. Dengan memastikan bahwa hak-hak ini diakui dan dilindungi, hukum negara menciptakan fondasi yang kuat bagi keberlangsungan masyarakat yang demokratis dan beradab. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, hak-hak individu dapat dilanggar, yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan sosial dan ketidakadilan.

Hukum negara juga berfungsi sebagai pengatur perilaku masyarakat. Melalui serangkaian peraturan dan undang-undang, hukum negara menetapkan standar perilaku yang diperlukan untuk menjaga perdamaian dan harmoni di antara warga negara. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari aturan lalu lintas hingga hukum pajak dan peraturan zonasi. Dengan mengatur perilaku masyarakat, hukum negara membantu mencegah konflik dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kemajuan sosial dan ekonomi. Aspek paling vital dari peran hukum negara adalah penegakan keadilan. Hukum hanya memiliki makna jika ditegakkan secara adil dan merata bagi semua orang tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik mereka. Ini berarti bahwa lembaga penegakan hukum harus bekerja secara transparan dan akuntabel, dengan mengikuti prosedur yang jelas dan adil dalam menangani pelanggaran hukum. Keadilan juga berarti bahwa sanksi

yang diberikan harus sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan, dan bahwa individu memiliki hak untuk dipresumsikan tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya.

Untuk mencapai tujuan ini, penting bagi sistem hukum negara untuk memiliki infrastruktur yang kuat dan mandiri. Ini termasuk lembaga-lembaga seperti kepolisian, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, yang bekerja sama untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada semua warga negara. Dengan memiliki sistem hukum yang kuat, negara dapat memastikan bahwa aturan-aturan yang ditetapkan dihormati dan ditaati oleh semua orang, sehingga menciptakan rasa percaya dan keamanan dalam masyarakat. Meskipun peran hukum negara sangat penting, tidak dapat dihindari bahwa sistem hukum juga dapat memiliki kelemahan dan kekurangan. Misalnya, ada risiko penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum, serta kelemahan dalam sistem peradilan yang dapat menyebabkan ketidakadilan. Selain itu, hukum juga dapat menjadi kaku dan lambat dalam menanggapi perubahan sosial dan teknologi yang cepat. Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi sistem hukum negara untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Ini dapat dilakukan melalui reformasi hukum yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas sistem hukum bagi semua warga negara. Selain itu, pendidikan hukum juga dapat menjadi kunci untuk memberdayakan masyarakat dalam memahami hak-hak mereka dan bagaimana mereka dapat melindungi diri mereka sendiri dalam sistem hukum yang kompleks. Hukum negara memiliki peran yang krusial dalam menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat. Melalui perlindungan hak-hak warga negara, pengaturan perilaku masyarakat, dan penegakan keadilan, hukum negara membantu menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi semua orang. Namun, untuk memastikan bahwa sistem hukum tetap efektif dan adil, penting bagi negara untuk terus melakukan reformasi dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Hanya dengan cara ini kita dapat memastikan bahwa hukum tetap menjadi alat yang kuat untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beradab.

Daftar Pustaka

- Ansari, T. S. (2018). Negara, BUMN dan Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi: Refleksi Seorang Advokat. *Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi dan Perubahan Sosial*, 5(2), 1-20.
- Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 91-101.
- Aryani, K., Masturah, D., Dilaga, I. S., Ilmiyawan, K. R., & Siswajanthi, F. (2023). Peranan Hukum Ekonomi Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM di Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(2), 13-13.
- Cortright, C. E., McCann, W., Willits, D., Hemmens, C., & Stohr, M. K. (2020). An analysis of state statutes regarding the role of law enforcement. *Criminal justice policy review*, 31(1), 103-132.
- Destiani, C., Lumba, A. F., Wenur, A. S., Halim, M. A., Effendi, M. E., & Dewi, R. A. R. M. (2023). Etika Profesi Polisi Republik Indonesia sebagai Perangkat Penegak Hukum dan Pelayanan Publik. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(06), 427-441.
- Istiqomah, A. N., Uzhma, Y. A., & Fadilah, S. (2024). Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1), 287-294.
- Markus, A., Nayoan, H., & Sampe, S. (2018). Peranan Lembaga Adat dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Desa Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Najicha, F. U. (2022). Peranan Hukum Pajak sebagai Sumber Keuangan Negara pada Pembangunan Nasional dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 169-181.
- Nugraha, S., Amalia, M., Handrianus, H., Alviani, F. M., Nuribadah, N., Mutolib, A., ... & Nurhidayati, N. (2023). *HUKUM DAN MASYARAKAT*.

- Purba, R. E., Maharani, D., BMY, M. A. A., & Al Zahra, R. Z. (2024). Peranan Hukum Positif Dalam Mengatur Cyberspace Untuk Menghadapi Tantangan Dan Peluang Di Era Digital. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(2), 167-176.
- Putri, P. A. A. A. (2022). Peranan Hukum Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 197-205.
- Rahim, A., Safitri, N. U., Nurjanah, N., Anabah, S., & Nurhikmah, W. (2023). Implementasi Hukum Administrasi Negara dalam Mencegah Praktik Korupsi di Indonesia. *JIP- Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(8), 5790-5794.
- Roy, M. T., Agung, A., Monica, T., Supenawati, E., Febrianty, Y., & Hosnah, A. U. (2024). Pelaksanaan Hukum Sebagai Kejadian Sosial Ditinjau Berdasarkan Aspek Sosiologi Hukum. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 8219-8224.
- See, B. R. (2020). Peranan Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat Menuju Masyarakat Indonesia Yang Sadar Hukum. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 1(1), 42-50.
- Yumna, F. (2023). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menjaga Ketertiban dan Ketentraman Serta Pelayanan Kepada Masyarakat. *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 1(1), 8-11.
- Zulkifli, Z. (2024). Peranan Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Positif di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 7563-7575.